

TAJUK RENCANA

Pengawasan Prokes di Tingkat RT

PERPANJANGAN penerapan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY mulai menunjukkan hasilnya. Jumlah pasien Covid-19 menurun, sedang angka kesembuhan meningkat. Meski begitu, bukan berarti DIY sudah terbebas dari pandemi Covid-19. Karena itu, pencegahan penularan Covid-19 harus terus dilakukan secara masif melalui gerakan 5 M.

Dalam waktu bersamaan, DIY juga terus menjalankan program vaksinasi dengan prioritas utama tenaga kesehatan, yang kemudian dilanjutkan dengan TNI/Polri, tenaga pelayanan publik dan nantinya diteruskan ke masyarakat umum. Diharapkan dalam kurun waktu setahun target vaksinasi kepada 70 persen jumlah penduduk Indonesia tercapai.

Vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan (prokes) harus dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan. Jangan sampai vaksinasi kalah cepat dengan penyebaran Covid-19, karena kita ingin mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok. Kita tidak menutup mata, selama diterapkan PTKM atau PPKM masih dijumpai berbagai pelanggaran, terbanyak pelanggaran berupa tidak memakai masker atau memakai masker namun tidak benar. Berikutnya ditemukan pelanggaran abai jaga jarak atau masih ditemukannya kerumunan yang potensial menyebarkan Covid-19.

Walaupun pelanggaran tersebut trennya menurun, namun tetap bisa membahayakan karena berpotensi menyumbang kenaikan jumlah pasien Covid-19.

Evaluasi PPKM berbasis mikro di DIY yang telah dilaporkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X ke pusat nampaknya makin menguatkan opti-

misme bahwa DIY bakal terbebas dari Covid-19, dengan catatan masyarakat disiplin menerapkan prokes. Bahwa banyak pelaku usaha yang mengeluh karena omzetnya menurun selama diberlakukan PTKM atau PPKM tentu fenomena yang wajar. Bahkan para pedagang kaki lima (PKL) di DIY yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) melaporkan 50 persen pedagang tak berjualan, karena omzet mengalami penurunan luar biasa sejak diberlakukan PTKM. Mereka memilih tidak berjualan daripada mengeluarkan biaya lebih besar (KR 14/2).

Mereka mengharapakan Pemda DIY meniadakan kebijakan pembatasan, karena pencegahan penyebaran virus Korona bukan masalah pembatasan waktu, tetapi terkait disiplin pelaksanaan prokes. Hemat kita, anggapan ini ada benarnya, namun tidak seluruhnya tepat. Sebab, antara pembatasan waktu operasional usaha terkait erat dengan penegakan disiplin. Kita sangat yakin, bila seluruh pelaku usaha dan warga disiplin menerapkan prokes, niscaya tak akan diberlakukan PTKM atau PPKM.

Sudah diberlakukan PTKM saja, masih cukup banyak yang melanggar, apalagi tidak diberlakukan. Justru dengan penerapan PTKM berbasis mikro ini akan mendorong masyarakat lebih taat pada prokes.

Kini, melalui pembentukan satuan tugas Covid-19 hingga tingkat RT, kita sangat optimis PTKM berbasis mikro akan efektif. Pengawasan relatif mudah dilakukan karena melibatkan unsur terkecil di lembaga masyarakat, yakni RT dan kelompok masyarakat di tingkat bawah. Mobilitas ke luar masuk wilayah pun relatif mudah dilakukan. Lebih penting dilakukan adalah memperkuat pengawasan serta tidak ragu untuk menegur bila ada warga yang melakukan pelanggaran. □

KASUS Aisha Wedding bak mengusik macan tidur mengenai pernikahan anak. Di tengah semua daya diarahkan untuk kampanye menurunkan angka perkawinan anak, muncul ajakan yang menawarkan pencarian jodoh bagi anak-anak perempuan dan perempuan muda. Caranya, dengan memfasilitasi proses perkawinan perempuan dari usia 12 - 21 tahun, juga memfasilitasi perkawinan poligami. Ada yang menyebut, caranya mirip perdagangan perempuan model ‘pengantin pesanan’ di Kalimantan Barat.

Bisa dipahami jika Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA) dan semua LSM yang bergerak dalam isu perlindungan anak menjadi geram (KR, 11/2) dengan ‘promosi’ tersebut. Apalagi harus diakui, pernikahan anak atau pernikahan dini adalah fenomena gunung es yang masih menghantui bangsa ini.

Menteri PP-PA Bintang Puspayoga tegas menyebut bahwa promosi ini bertentangan dengan hukum dan sangat tidak memperhatikan nasib serta masa depan anak Indonesia. Sebab di dalam ketentuan usia menikah UU 16/2019 – perubahan atas UU 1/1974 – disebutkan, perkawinan hanya diizinkan apabila lelaki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan usia, orang tua pihak lelaki atau perempuan dapat minta dispensasi ke pengadilan. Dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang kuat.

Persoalan Serius

Persoalan pernikahan anak di bawah umur, adalah persoalan serius yang dihadapi bangsa ini, sejak sebelum kemerdekaan. Perjuangan untuk menekan angka pernikahan anak sudah dise-rukan sejak Kongres Perempuan I, tahun 1928. Karenanya persoalan pernikahan anak harus menjadi kepedulian dan perhatian serius semua pihak.

Perhatian serius harus ada mengingat dampak sistemik dan berkelanjutan dari perkawinan anak. Sebab, banyak sekali

Fadmi Sustiwi

dampak ikutan yang muncul dari terjadinya pernikahan anak, yang menyebabkan kondisi sulit bagi anak. Mulai dari putusnya pendidikan, kerentanan kesehatan reproduksi, kerentanan kehidupan keluarga dan hingga berdampak kelahiran generasi stunting serta kemiskinan berkepanjangan (KPAI, 2020). Realita yang akan sangat berdampak bagi sumberdaya manusia Indonesia masa datang.

Orang dewasa seharusnya tidak me-



rampas masa depan anak bangsa. Karena pernikahan anak harus kita sadari telah membuat anak-anak terampas dari dunianya : dunia bermain, dunia belajar, dunia bermainja pada orang tua dan lainnya. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak terkarbit menuju ‘dunia dewasa’. Kita tidak ingin, dalam usia anak-anak mereka harus melahirkan anak dan menjadi ibu.

UU adalah hukum positif yang mesti ditegakkan. Adalah sebuah kenyataan bila negara saat ini sedang melakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak. Sebagaimana ketentuan UU No 16/2019 bahwa syarat pernikahan mini-

mal berusia 19 tahun. Maka, secara praktik pernikahan anak mestinya dihentikan.

Indonesia Emas

Ada mimpi besar yang sedang dirajut bangsa, Indonesia Emas 2045. Hadirnya bonus demografi sebagai fenomena kependudukan pun sudah sudah di-anyam sebagai mimpi sebagian besar bangsa. Mimpi besar bahwa dalam periode ini Indonesia sudah dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan bangsa : kesenjangan, intoleransi, korupsi, kemiskinan, diskriminasi gender dan lainnya. Indonesia sejahtera adalah *ending*-nya.

Bonus demografi ini akan menjadi kekuatan bila generasi muda yang akan berada di puncak saat Indonesia Emas adalah orang-orang muda terdidik dengan pelbagai kompetensi dan mampu bersaing secara global. Mereka yang sekarang sedang dalam masa pendidikan akhlak, intelektual, karakter, moral di tingkat dasar hingga tinggi inilah yang akan menjadi kunci penting menuju Indonesia Emas tersebut.

Untuk menuju Indonesia Emas dengan bonus demografi unggul, sosialisasi menghentikan perkawinan anak dan pencegahannya, harus digerakkan. Dampak fisik, medis bahkan psikologisnya sangat besar. Bahasa agama, lebih banyak mudharat dari manfaatnya. Jika sosialisasi pencegahan tidak massif, bonus demografi akan menjadi bencana demografi. Dan Indonesia Emas sekadar mimpi. □

*) **Fadmi Sustiwi**, wartawan peduli keadilan gender

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

 **pikiranpembaca@gmail.com**  **0895-6394-11000**

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Mencintai Itu Tanpa Tapi

MENCINTAI tanpa tapi itu rasanya sangat sulit dan perlu usaha besar untuk memurnikan diri. Kasih itu adalah rasa terdalam yang dianugerahkan kepada manusia untuk disebarkan kepada sesama manusia. Memperingati hari kasih sayang, apakah kasih itu ber-tapi dan sayang itu masih ada tapinya?

Setadewa, salah satu tokoh pemikiran Romo YB Mangunwijaya, merupakan salah satu contoh mencintai tanpa tapi. Perjalanan, perjuangan, dan pemaknaan hidup selama perjalanan dan perjuangan membawanya pada sebuah kesadaran bahwa, mencintai itu tanpa tapi dan tidak selamanya harus memiliki.

Setadewa bertemu dengan sosok Atik dalam perjuangan yang berbeda medan perangnya. Ada rasa di antara mereka. Atik memiliki hubungan dengan seorang direktur rumah sakit. Dan karena itu, Atik membujuk Setadewa alias Teto untuk menjadi kakak angkat Atik atau nama aslinya Larasati. Suami Atik, Janakatamsi, ahli geologi yang mengetahui rencana Atik itupun tidak keberatan dalam menerima

Setadewa alias Teto menjadi kakak angkat Atik - hingga salah satu nama anak pasangan Janakatamsi dan Larasati diberi nama Teto, nama Setadewa sewaktu kecil.

Teto mengangkat anak pasangan Jana dan Atik karena musuhibah yang terjadi di Kolombo. Teto menangkap sasmita saat melihat keti-ga anak pasangan Jana dan Atik ini.

Tidak mudah mencintai tanpa tapi. Rasa ego terselubung masih terus menghantui perasaan tiap pasangan. Namun, rasa itu akan terus mengarahkan pasangan pada makna kasih sayang yang tanpa tapi itu.

Selamat hari kasih sayang. Jadikanlah tanggal 14 Februari tiap tahunnya sebagai pondasi bangunan cinta antara dua insan yang saling mencintai, memurnikan hati untuk mencintai tanpa tapi, dan mem-pertegas janji bahwa tak ada yang memisahkan kecuali Tuhan sendiri yang menemukan dan memisah-kan.

*) **Sixtus Angga Pratama Mahardikan**, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma.

GENAP setahun bangsa ini berjuang melawan wabah Covid-19. Tahun 2020 akan menjadi catatan kelam dalam sejarah perekonomian bangsa dimana tahun ini kembali Indonesia mengalami resesi setelah tiga kuartal berturut turut pertumbuhan ekonominya berkontraksi minus. Industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat meluasnya wabah Covid-19.

Tahun 2019 posisi daya saing pariwisata Indonesia versi *World Economic Forum* (WEF) mengalami kenaikan cukup signifikan. Mengacu laporan *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) 2019 yang dikeluarkan WEF, peringkat Indonesia naik dua poin dari urutan 42 di 2017 naik menjadi peringkat 40 di 2019 dari 140 negara di dunia. Sedangkan untuk lingkup Asia-Pasific TTCI2019, Indonesia berada pada peringkat 12 dibawah Thailand, Malaysia dan Singapore. Prestasi ini tentu membawa optimisme untuk pengembangan bisnis pariwisata ke depan. Tahun 2020 diharapkan bisa menjadi titik awal bagi Indonesia untuk berpijak dalam menggenjot pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menopang perekonomian negara. Harapannya peringkat daya saing pariwisata bisa naik pada TTCI 2021. Namun merebaknya wabah Covid-19 sedikit banyak telah memupus harapan itu. Mampukah Indonesia bertahan pada ajang TTCI2021 mendatang?

Jumlah Wisman

Data BPS mencatat bahwa selama tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 4,02 juta kunjungan turun sebesar 75,03% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman tahun 2019 yang berjumlah 16,11 juta kunjungan. Penurunan kunjungan wisman mengakibatkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang

Yulianti

ikut turun menjadi 40,79% pada Desember 2020, turun sebesar 18,60 poin dari kondisi Desember 2019 yang sebesar 59,39%. TPK merupakan indikator yang menggambarkan produktivitas usaha jasa akomodasi.

Lesunya aktifitas pariwisata terjadi di seluruh wilayah di Indonesia dengan kota-kota destinasi tujuan wisata di dalamnya, tak terkecuali DIY. DIY sebagai provinsi penyandang predikat kota wisata dan kota budaya, sektor pariwisatanya terpuruk selama pandemi. Bersumber data BPS, sepanjang tahun 2020 jumlah kunjungan wisman hanya terjadi pada bulan Januari hingga Maret. Itupun mengalami penurunan secara bertahap. Sementara Juni, kunjungan wisman tercatat hanya 7 pengunjung. Selebihnya pada periode April-Mei dan Juli-Desember 2020 kunjungan wisman berada pada titik terendah alias nihil.

Membangkitkan sektor pariwisata di tengah masa pandemi bukan perkara gampang. Mengingat hal tersebut merupakan dua masalah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi upaya penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan pemberlakuan pembatasan sosial dan mengurangi aktivitas kegiatan masyarakat. Sementara di sisi lain membangkitkan sektor pariwisata dibutuhkan pergerakan dan aktifitas sosial-ekonomi masyarakat dalam skala besar.

Mulai Berfokus

Upaya selanjutnya sebaiknya pemerintah membatasi impor luar negeri dengan pemanfaatan optimal produk dalam negeri. Hal ini akan membuka

kesempatan pada industri dalam negeri khususnya level UMKM untuk menjalankan roda produksinya. Stimulus permodalan untuk skala UMKM sangat dibutuhkan terutama di masa pandemi. Besarnya ukuran dana desa seyogyanya tidak hanya tersedak untuk pembangunan infrastruktur.

Tantangan sekaligus peluang dunia pariwisata di tengah pandemi seharusnya mulai berfokus pada bagaimana mengembangkan pariwisata Indonesia agar mampu menghadirkan jumlah wisatawan yang tidak banyak namun devisa yang dihasilkan tinggi bukan malah sebaliknya. Hal ini hendaknya mulai dipikirkan dari sekarang agar kedepannya Indonesia mampu menciptakan pariwisata berkualitas yang berkelanjutan sehingga mampu bersaing dengan negara luar. Kolaborasi semua pihak utamanya pemerintah, swasta serta seluruh elemen masyarakat mutlak dibutuhkan untuk mewujudkannya. □

*) **Yulianti**, Statistisi Ahli Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo

Pojok KR

PKL DIY butuh stimulus permodalan.
-- Buruh juga butuh insentif upah.

Wapres: bila banjir berulang, berarti kita tak cerdas.

-- Maksudnya banjirnya lebih cerdas.

Warga tolak kosongkan Rumdim PT KAI.
-- Soal klasik dengan modus yang sama

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan. Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa. Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono,. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkryk23@yahoo.com, iklandkryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.